



**Rencana Kerja Tahunan (RKT)
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
TA. 2023**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (RKT Deputy Bidang Pemberantasan BNN) Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Renstra Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana amanat Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

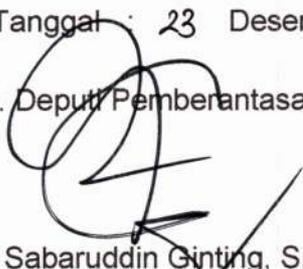
Penyusunan RKT Deputy Bidang Pemberantasan BNN dilakukan untuk mendukung tugas Sekretariat Utama BNN yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Dokumen RKT Deputy Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2023 yang telah tersusun ini untuk dijadikan sebagai acuan bagi masing-masing unit eselon II/Direktorat di lingkungan Deputy Bidang Pemberantasan BNN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan pada periode Tahun 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam mewujudkan keberhasilan program yang telah kita rencanakan. Amin.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2023

Plt. Deputy Pemberantasan BNN


Sabaruddin Ginting, S.I.K.

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkotika digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkotika bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak

Pola peredaran gelap narkotika di Indonesia selalu berubah-ubah tergantung kondisi pengamanan yang ada. Narkotika ilegal dari luar negeri pada umumnya masuk ke Indonesia melalui Malaysia di bawah kendali jaringan sindikat internasional West Africa di Malaysia dan jaringan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pintu masuk narkotika kebanyakan melalui jalur pelabuhan laut dan sungai, serta perbatasan negara yang masih sangat minim pengawasan. Saat ini jalur darat dan udara, baik resmi maupun tidak resmi masih mudah ditembus untuk menyelundupkan narkotika, baik dengan atau tanpa keterlibatan oknum aparat.

Modus operandi oleh jaringan sindikat yang memasukkan narkotika secara gelap di pelabuhan udara sangat bervariasi, bahkan diantaranya dapat melibatkan beberapa orang pelaku secara bersamaan melalui satu pintu atau berbagai pintu masuk.

Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika di Indonesia yang berhasil diungkap BNN dalam kurun waktu antara tahun 2015 s.d. 2019 mencapai 150 Jaringan, nasional maupun internasional. Termasuk di dalamnya jaringan West Africa, Cina, Iran, Malaysia, dan India. Daya tarik finansial dari bisnis peredaran gelap narkotika mengakibatkan banyak warga masyarakat yang terjerumus sebagai kurir jaringan sindikat peredaran gelap narkotika. Serta terhitung dalam kurun waktu antara tahun 2015 s.d. 2019 sebanyak 6.984 tersangka.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk mengoptimalkan pengungkapan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.

Secara singkat dapat didapatkan permasalahan dan hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan

Modus operandi yang semakin bervariasi, penggunaan teknologi yang canggih dan pendanaan yang besar oleh jaringan sindikat narkotika dalam menjalankan bisnisnya, sehingga sarana, prasarana, kuantitas dan kualitas

SDM para penyelidik dan penyidik Deputy Pemberantasan harus dioptimalkan tentunya dengan dukungan anggaran yang lebih besar

2. Hasil Evaluasi

- a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelidik, penyidik, dan analis intelijen melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar negeri.
- b. Menambah dan melengkapi peralatan intelijen untuk mengimbangi modus operandi yang berkembang.
- c. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan penyelidikan dan penyidikan, operasionalisasi posko Interdiksi, operasionalisasi koneksi jaringan telekomunikasi.
- d. Mengoptimalkan sistem analisa data intelijen yang sudah ada untuk mendukung keakurasian penentuan dan penetapan target operasi serta penentuan cara bertindak di lapangan.
- e. Mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset para pelaku kejahatan narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka menghentikan aktifitas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. Menambah fasilitas dan meningkatkan fasilitas rumah tahanan negara cabang yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Pemberantasan BNN dipimpin oleh seorang Deputi (Eselon I) membawahi langsung Direktur (Eselon II), pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Kepala Sub Direktorat/Kasubdit (Eselon III), pelaksanaan tugas administrasi kedeputian dibantu oleh seorang Kasubag TU (Eselon IV).

Kepala BNN Provinsi bertanggungjawab dan berkoordinasi mengenai pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap Narkotika kepada Deputi Bidang Pemberantasan BNN.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN secara struktur organisasi terdiri atas :

1. Direktorat Intelijen

Direktorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Direktorat Intelijen terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Intelijen Teknologi;
- 2) Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional;
- 3) Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi.

2. **Direktorat Narkotika**
Direktorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami dan sintetis.
Direktorat Narkotika terdiri atas:
 - a. Subdirektorat Narkotika Alami; dan
 - b. Subdirektorat Narkotika Sintetis.

3. **Direktorat Psikotropika dan Prekursor**
Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor.
Direktorat Psikotropika dan Prekursor terdiri atas:
 - a. Subdirektorat Psikotropika; dan
 - b. Subdirektorat Prekursor.

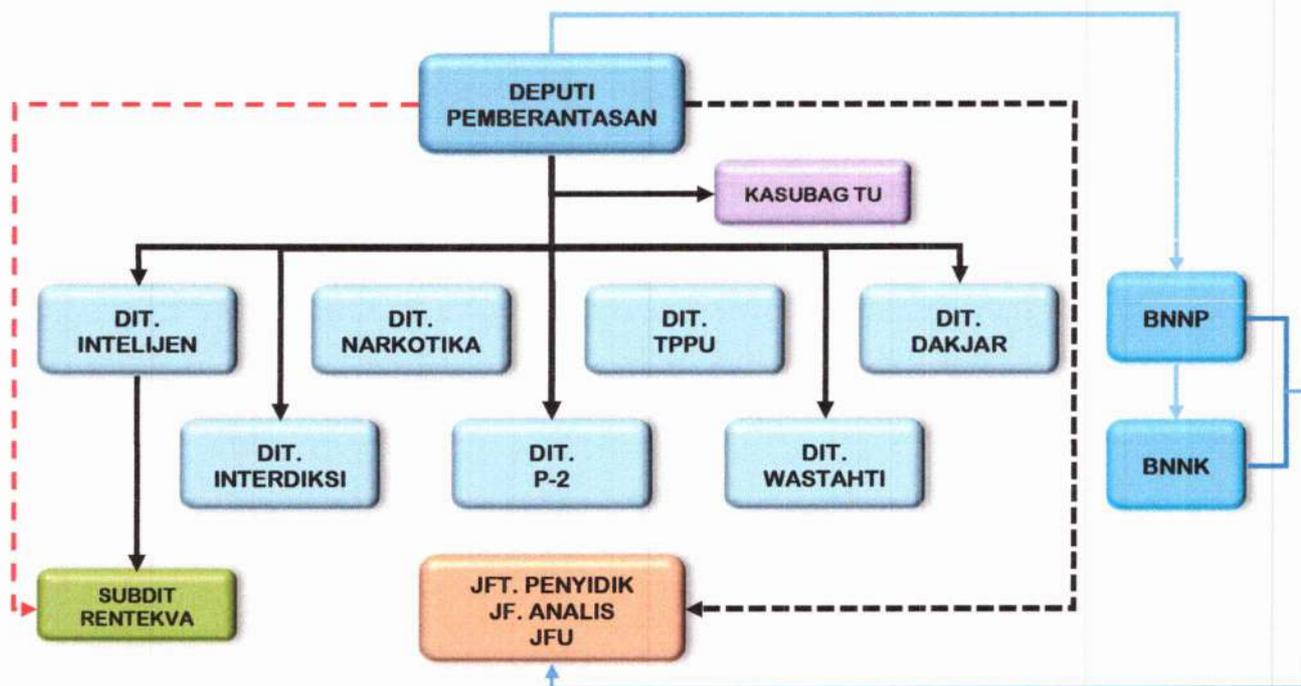
4. **Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang**
Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas:
 - a. Subdirektorat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b. Subdirektorat Data dan Aset Jaringan.

5. **Direktorat Interdiksi**
Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas.
Direktorat Interdiksi terdiri atas :
 - a. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan; dan
 - b. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas.

6. **Direktorat Penindakan dan Pengejaran**
Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas :
 - a. Subdirektorat Penindakan; dan
 - b. Subdirektorat Pengejaran.

7. **Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.**
Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti.
Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti terdiri atas :
 - a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan
 - b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti.

STRUKTUR



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT Deputy Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Deputy Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2023.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pemberantasan BNN.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Deputy Bidang Pemberantasan BNN.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2023

A. SASARAN STRATEGI

Deputi Bidang Pemberantasan memiliki sasaran strategis adalah Meningkatkan pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba" dengan indikator :

1. Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap
2. Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Pemberantasan BNN, maka upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah kasus tindak pidana narkoba yang diungkap oleh jajaran Deputi Bidang Pemberantasan.
2. Meningkatnya jumlah aset Tindak Pidana Pencucian Uang hasil kejahatan tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap dan disita oleh jajaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
3. Menurunnya jumlah laboratorium gelap (clandestine laboratorium) pembuat narkoba di Indonesia.
4. Meningkatnya profesionalisme pegawai bidang pemberantasan di lingkup Deputi Bidang Pemberantasan.

B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberantasan memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dengan dua indikator kinerja:

1. Indikator kinerja pertama adalah jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap dengan target pada tahun 2023 sebesar 39 Jaringan
2. Indikator kinerja kedua adalah Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang memiliki target pada tahun 2021 sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	
			TARGET 2023	ANGGARAN 2023
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap	39 Jaringan	Rp. 437.319.068.550,-
		Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	100 %	

KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap	Jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika adalah kelompok terstruktur (sejumlah orang, peranan, posisi, status, organisasi, dan sebagainya yang memiliki ikatan saling bekerjasama dan diikat oleh adanya unsur kepercayaan) yang melakukan kejahatan peredaran gelap narkotika dengan berbagai macam cara untuk tujuan mencari keuntungan dan melakukan	Data Pengungkapan Jaringan Sindikat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Mengingat jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika merupakan kejahatan lintas negara, maka pengungkapan 1 (satu) jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika sampai dengan akar-akarnya bukanlah pekerjaan mudah. Selain itu, jaringan sindikat yang telah terungkap, dapat tumbuh kembali dalam bentuk sel-sel jaringan baru. Oleh karena itu, dalam mengukur capaian kinerja pada tahun berjalan, sangat dimungkinkan memiliki korelasi dengan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
			manipulasi finansial secara canggih. Bentuk dan karakteristik jaringan sindikat lebih mementingkan aspek keamanan dibanding efisiensi masing-masing peranan (penyanggah dana, pemilik narkoba, produsen, pengendali, bandar besar, bandar penjual / pengedar dan kurir.		pengungkapan jaringan sindikat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, terkait penghitungan data jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terungkap dilakukan dengan menggunakan data hasil pemetaan jaringan sindikat oleh Direktorat Intelijen BNN. Pengungkapan jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan BNN merupakan hasil kerja bersama antar Direktorat sesuai peranan masing-masing, Direktorat tersebut adalah Direktorat Intelijen, Direktorat Narkoba, Direktorat Interdiksi, Direktorat Psikotropika dan Prekursor, dan Direktorat Penindakan dan Pengejaran, serta Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
		Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	Penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba adalah penanganan kasus yang dimulai dari	Data Berkas Perkara TPPU Hasil Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba P-21 oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan data seluruh berkas perkara TPPU dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang ditangani BNN (Unit Pusat dan Vertikal) dengan data capaian penyelesaian

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
			pemetaan dan penelusuran transaksi keuangan dan aset harta kekayaan, penyelidikan, penyitaan aset, penyidikan sampai pada tahapan pemberkasan perkara TPPU yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).		seluruh berkas perkara TPPU dari basil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) dan apa yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam TPPU untuk dilakukan penuntutan.

Untuk mendukung terlaksananya indikator kinerja Esselon I terdapat indikator kegiatan pada Esselon II diantaranya :

1. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan dengan target 25 Peta Jaringan pada tahun 2023.
2. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap dan Peredaran Gelap Narkotika
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:
 - Indikator kinerja pertama adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dengan target 596 berkas perkara pada tahun 2023.
 - Indikator kinerja kedua adalah jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan dengan target 11 titik setiap tahunnya pada tahun 2023.

3. Kegiatan Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat.
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 dengan target 60 Berkas Perkara pada tahun 2023.
4. Kegiatan Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:
 - Indikator Kinerja pertama adalah persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap dengan target 100% tahun 2023.
 - Indikator kinerja kedua adalah persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap dengan target 100% tahun 2023.
5. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba. Kegiatan ini memiliki tiga indikator kinerja:
 - Indikator kinerja pertama adalah jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21 dengan target 20 Berkas Perkara pada tahun 2023.
 - Indikator kinerja kedua adalah Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi dengan target setiap tahun memperoleh 100% pada tahun 2023.
 - Indikator kinerja ketiga adalah jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika dengan target 15 Laporan pada tahun 2023.

Target PNBPN tahun 2023 untuk penerbitan rekomendasi penunjukan importir/ ekspor terdaftar prekursor narkoba non farmasi sejumlah 54 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp. 106.678.000,-

6. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan target 30 Berkas Perkara pada tahun 2023.

7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:
 - Indikator kinerja pertama adalah layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU dengan target 100% pada tahun 2023.
 - Indikator kinerja kedua adalah layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non narkoba yang didalamnya juga termasuk layanan Assesment Terpadu dengan target 100 % pada tahun 2023.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kegiatan ini memiliki sasaran Indeks kepuasa. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:
 - Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran dengan target 1 Layanan pada tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	ANGGARAN 2023	KET
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	25 Peta Jaringan	Rp. 20.637.834.000	Pusat & Daerah
TOTAL				Rp. 20.637.834.000	
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	596 Berkas Perkara	Rp. 41.047.540.000	Pusat & Daerah
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	11 Titik Lahan	Rp. 4.500.000.000	Pusat & Daerah
TOTAL				Rp. 45.547.540.000	
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 Berkas Perkara	Rp. 11.811.606.000	Pusat
TOTAL				Rp. 11.811.606.000	
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100%	Rp. 7.366.834.000	Pusat
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	100%	Rp. 8.645.000.000	Pusat
TOTAL				Rp. 16.011.834.000	
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi Psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas Perkara	Rp. 3.804.350.000	Pusat
		Jumlah pengungkapan kasus	15 Laporan	Rp. 1.707.700.000	Pusat
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau	100 %	Rp. 493.355.000	Pusat

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	ANGGARAN 2023	KET
		peredaran prekursor non-farmasi			
TOTAL				Rp. 6.067.705.000	
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	30 Berkas	Rp. 16.747.097.000	Pusat & Daerah
TOTAL				Rp. 16.747.097.000	
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %	Rp. 12.345.886.550	Pusat & Daerah
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %	Rp. 5.973.249.000	Pusat & Daerah
TOTAL				Rp. 18.319.135.550	
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Layanan	Rp. 302.176.317.000	Pusat
TOTAL				Rp. 302.176.317.000	
TOTAL PAGU PUSAT DAN VERTIKAL				Rp. 437.319.068.550	

TARGET PNBP DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN TA.2023

KODE	SATKER PENGGUNA / AKUN PENDAPATAN RINCIAN TARGET	PERHITUNGAN TARGET			PNBP FUNGSIONAL	PAGU PNBP IZIN KEMENKEU		USULAN PAGU	
		VOLUME	TARIF / HARGA	JUMLAH	JUMLAH	%	JUMLAH		
681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN			106.678.000	106.678.000		80.008.000	80.008.000	
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya			106.678.000	106.678.000		80.008.000		
	PMK NOMOR 125 TAHUN 2021 K/L : (060) JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IMPORTIR DAN EKSPORTIR TERDAFTAR PREKURSOR NARKOTIKA NON FARMASI YANG BERLAKU PADA BNN, POLRI, DAN KEMENPERIN (PMK NOMOR 125 TAHUN 2021)								
000001	Penerbitan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	2 Per Pengajuan permohonan	1.975.500	3.951.000	3.951.000	75	2.963.000		
000002	Penerbitan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi	8 Per Pengajuan permohonan	1.975.500	15.804.000	15.804.000	75	11.853.000		
000003	Penerbitan rekomendasi persetujuan impor prekursor narkotika non farmasi	43 Per Pengajuan permohonan	1.975.500	84.947.000	84.947.000	75	63.710.000		
000004	Penerbitan rekomendasi persetujuan ekspor prekursor narkotika non farmasi	1 Per Pengajuan permohonan	1.975.500	1.976.000	1.976.000	75	1.482.000		
	TOTAL JUMLAH	54 Per Pengajuan permohonan		106.678.000	106.678.000		80.008.000	80.008.000	

RENCANA PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	ANGGARAN 2023	PELAKSANAAN
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	25 Peta Jaringan	Rp. 20.637.834.000	Januari s.d. Desember 2023
		TOTAL			Rp. 20.637.834.000
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	596 Berkas Perkara	Rp. 41.047.540.000	Januari s.d. Desember 2023
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	11 Titik Lahan	Rp. 4.500.000.000	Januari s.d. Desember 2023
TOTAL			Rp. 45.547.540.000		
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	60 Berkas Perkara	Rp. 11.811.606.000	Januari s.d. Desember 2023
		TOTAL			Rp. 11.811.606.000
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100%	Rp. 7.366.834.000	Januari s.d. Desember 2023
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	100%	Rp. 8.645.000.000	Januari s.d. Desember 2023
TOTAL			Rp. 16.011.834.000		
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi Psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas Perkara	Rp. 3.804.350.000	Januari s.d. Desember 2023
		Jumlah pengungkapan kasus	15 Laporan	Rp. 1.707.700.000	Januari s.d. Desember 2023
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau	100 %	Rp. 493.355.000	Januari s.d. Desember 2023

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	ANGGARAN 2023	PELAKSANAAN
		peredaran prekursor non-farmasi			
TOTAL				Rp. 6.067.705.000	
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	30 Berkas	Rp. 16.747.097.000	Januari s.d. Desember 2023
TOTAL				Rp. 16.747.097.000	
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %	Rp. 12.345.886.550	Januari s.d. Desember 2023
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %	Rp. 5.973.249.000	Januari s.d. Desember 2023
TOTAL				Rp. 18.319.135.550	
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Layanan	Rp. 302.176.317.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Kontraktual belanja 53 persiapan pada Minggu ke-2 Desember 2022 Selesai pada bulan Agustus 2023 2. Untuk Kontraktual belanja 52 dimulai Januari Selesai bulan Desember 2023 3. Untuk operasional lainnya dilaksanakan Januari s.d. Desember 2023
TOTAL				Rp. 302.176.317.000	
TOTAL PAGU PUSAT DAN VERTIKAL				Rp. 437.319.068.550	

❖ PNPB dilaksanakan Januari s.d. Desember 2023

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen Deputi Bidang Pemberantasan BNN dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Deputi Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Deputi Bidang Pemberantasan. Rencana kinerja tahunan Tahun 2023 disusun secara koordinasi dari masing-masing Direktorat dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN pada Tahun 2023.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2023

Pt. Deputi Pemberantasan BNN


Sabaruddin Ginting, S.I.K.